



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



**RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO**

	DAFTAR ISI	HAL.
	DAFTAR ISI	1
	LEMBAR PERNYATAAN	2
BAB I.	PENDAHULUAN	3
	1.1. LATAR BELAKANG	3
	1.2. LANDASAN HUKUM	4
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022	7
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PD	7-13
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN	14
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	14-19
	2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	20-22
	2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	23
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN	24-27
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	28-31
BAB V.	PENUTUP	32

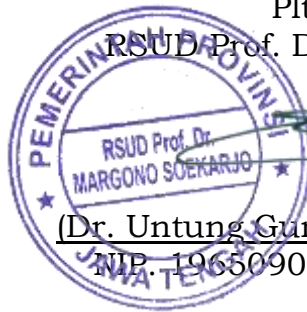
LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023.

Purwokerto, November 2022

Plt. Direktur

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



(Dr. Untung Gunarto, Sp. S. MM)

NIP. 19650909 200001 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 2 dan pasal 11, disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RKPD, RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (OPD), dan Renja Perangkat Daerah OPD.

Renja Perangkat Daerah (Renja OPD) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk periode tahun 2023 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang kesehatan yang tumbuh dan berkembang di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RENJA RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2023 berpedoman pada Tema Pembangunan Daerah yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah, dan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, yaitu Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan.

Penyusunan Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Kesehatan. Dilaksanakan di masing-masing bidang dan bagian.

Tahun Anggaran 2023 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2018-2023, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- J. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- K. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- M. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- N. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

- O. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Q. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/80/X/2008 tentang Penempatan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
- R. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0003834 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.
- S. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.
- T. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra OPD 2018-2023.
- U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
- V. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah.
- W. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050.24/0002645 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah dan rancangan awal Rencana Strategis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 2018-2023;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya pelayanan sesuai dengan SPM.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan Renja yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Memuat reuiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 bekaitan dengan realisasi program kegiatan yang tercapai/tidak tercapai, faktor penyebab ketidak tercapaian, implikasi dan kebijakan cara mengatasi faktor peayebab.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi; Tujuan dan sasaran Renja.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

Bab V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dan Capaian Renstra PD.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto s/d Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam uraian berikut :

- a. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Yang Direncanakan : Nihil
- b. Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Yang direncanakan adalah :

Dari 2 Program dan 6 Kegiatan yang direncanakan semua tercapai sesuai target yang ditetapkan.

- c. Realisasi Program / Kegiatan Yang Melebihi Target Yang Direncanakan Adalah 2 Program :

Kode Program	Rincian Program	Faktor Penyebab	Implikasi	Keterangan Tambahan
1.02.02.1.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-

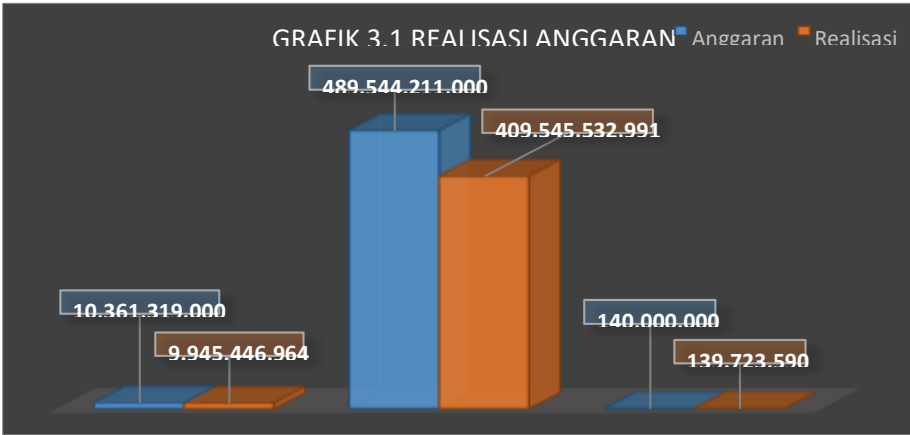
Kode Program	Rincian Program	Faktor Penyebab	Implikasi	Keterangan Tambahan
1.02.05.1.01	Program Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
	Bidang Kesehatan			

d. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan pada RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto adalah Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD berupa kegiatan Akreditasi RS Internasional dengan hasil RSMS “LULUS” dengan predikat “Internasional Bintang 6”, dan pada awal tahun 2020 telah dilaksanakan Reviu Akreditasi Tahun ke-satu melalui Perencanaan Perbaikan Strategi (PPS), selanjutnya akan dilaksanakan Reviu Akreditasi Internasional Tahun ke II pada tahun 2021 namun karena terkendala COVID-19 sehingga sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disebutkan bahwa Izin penyelenggaraan/operasional rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka izin penyelenggaraan/operasional dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. SeHINGA pada Tahun 2021 tidak dilakukan survei hanya menyerahkan daftar tilik Kesiapan Rumah sakit Era Pandemi yang di review oleh Kemenkes dan dilakukan verifikasi pada Bulan Oktober 2021.

Kegiatan pelayanan lainnya yang diraih RSUD Prof Dr Mrgono Soekarjo Tahun 2020 adalah inovasi pelayanan publik , Perangda, EVA (Elektronik Evaluasi). Dari sisi anggaran inovasi yang telah dilaksanakan tersebut terbukti berdampak positif terhadap efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan RS.

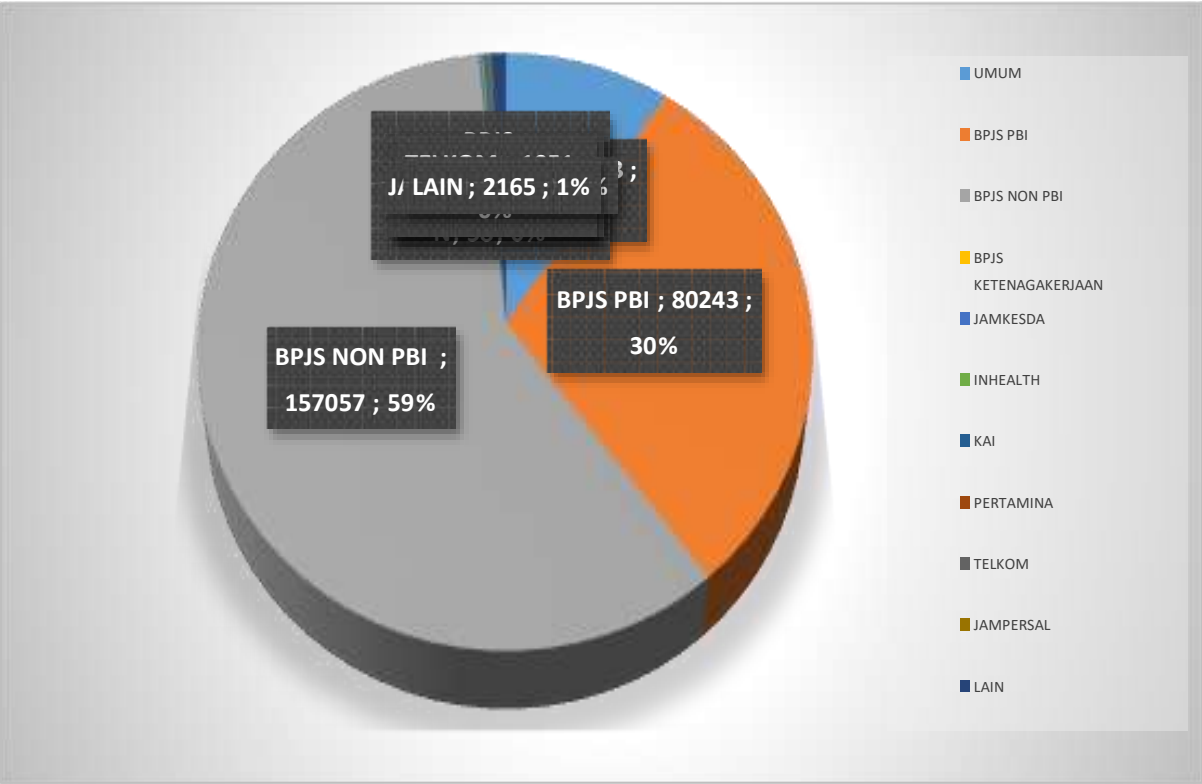
**Anggaran Dan Realisasi Belanja APBD
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun 2021**



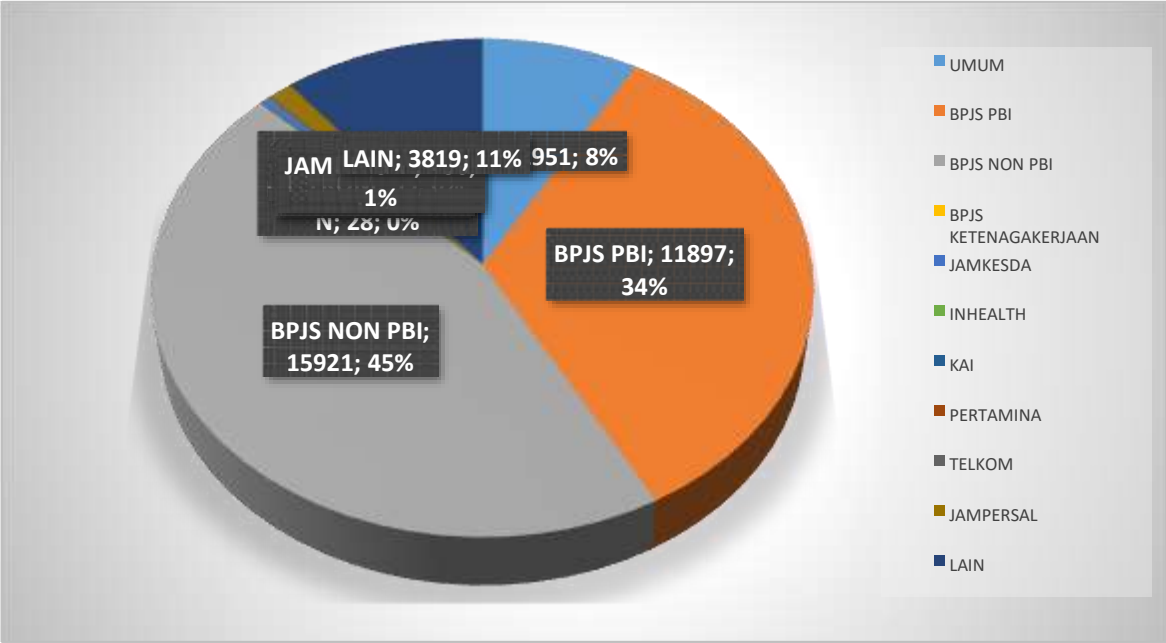
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.361.319.000,- dan realisasi sebesar Rp.9.945.446.964,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.415.872.036,-. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pagu anggaran sebesar Rp.489.544.211.000,- dan realisasi sebesar Rp.409.545.532.991,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.79.998.678.009,-. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp.140.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.139.723.590,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.276.410,-

- e. Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.
Terobosan pengembangan inovasi yang telah dilakukan berdampak melebihi target pencapaian program renstra PD, yang dapat dilihat dari data kunjungan pasien yang semakin meningkat.

Data Kunjungan Rawat Jalan Berdasar Penjamin
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun 2021



Data Kunjungan Rawat Inap Berdasar Penjamin
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun 2021



10 Besar Kasus Penyakit Tahun 2021
Sesuai Unggulan Renstra PD 2018-2023

NO	ICD10	DESKRIPSI BEDAH SARAF	JUMLAH
1	S06.40	Epidural haemorrhage, without open intracranial wound	107
2	S06.00	Concussion, without open intracranial wound	97
3	D32.0	Benign neoplasm: Cerebral meninges	90
4	S06.20	Diffuse brain injury, without open intracranial wound	83
5	S06.50	Traumatic subdural haemorrhage, without open intracranial wound	57
6	S06.30	Focal brain injury, without open intracranial wound	48
7	I62.0	Subdural haemorrhage (acute)(nontraumatic)	44
8	C71.9	Malignant neoplasm: Brain, unspecified	44
9	G91.1	Obstructive hydrocephalus	44
10	I61.5	Intracerebral haemorrhage, intraventricular	42

NO	ICD10	DESKRIPSI PENYAKIT JANTUNG	JUMLAH
1	I21.0	Acute transmural myocardial infarction of anterior wall	80
2	I21.4	Acute subendocardial myocardial infarction	75
3	I48	Atrial fibrillation and flutter	71
4	I50.0	Congestive heart failure	65
5	I21.1	Acute transmural myocardial infarction of inferior wall	59
6	I20.0	Unstable angina	32

NO	ICD10	DESKRIPSI PENYAKIT JANTUNG	JUMLAH
7	I11.0	Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure	32
8	i51.7	Cardiomegaly	22
9	I25.9	Chronic ischaemic heart disease, unspecified	17
10	I11.9	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	17

NO	ICD10	DESKRIPSI KASUS MATERNAL	JUMLAH
1	O14.9	Pre-eclampsia, unspecified	302
2	C53.9	Malignant neoplasm: Cervix uteri, unspecified	271
3	O13	Gestational [pregnancy-induced] hypertension without significant proteinuria	169
4	O61.0	Failed medical induction of labour	164
5	C56	Malignant neoplasm of ovary	154
6	D70	Agranulocytosis	150
7	O34.2	Maternal care due to uterine scar from previous surgery	143
8	O42.0	Premature rupture of membranes, onset of labour within 24 hours	124
9	O14.1	Severe pre-eclampsia	118
10	O68.9	Labour and delivery complicated by fetal stress, unspecified	91

- f. Nomenklatur penyusunan Renja Tahun 2021 mengalami transisi dengan diterbitkannya Permendagri No.90 Tahun 2019, sehingga terjadi perubahan nomenklatur program dan atau kegiatan yang dilaksanakan pada Renstra 2018-2023 (murni) dan Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2023. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2021 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tabel 2.1

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2021

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
								Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8
1				Urusan Pemerintahan						
1	02			Bidang Kesehatan						
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	100%	-	100%	100%	100%
1	02	02	1.01.10	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jml Paket Alat Kesehatan di RS Provinsi (DAK) yang dipenuhi	-	-	1 paket	1 paket	100%
			1.01.12	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas layanan Kesehatan	Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%
			1.01.16	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas layanan Kesehatan	Jml Paket Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan DBHCHT yang dipenuhi	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%

				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CRR Total	81%	72%	75%	104,97%	139,96%
1	02	02	1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	CRR Parsial	90%	84%	86%	135,76%	157,9%
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	40%	15%	15%	15%	100%
1	02	05	1.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	1800	900	1200	1315	109,58%
x	xx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	86	-	84	84	100%
			1.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (Administrasi Keuangan)	Jumlah paket pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	100%	-	100%	100%	100%

- g. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian Renstra tahun 2022 selengkapnya dapat diurai pada tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2022 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
								Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	11	12
1				Urusan Pemerintahan					
1	02			Bidang Kesehatan					
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	-	100%	100%	100%
1	02	02	1.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	100%	100%	100%
1	02	02	1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah paket pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	1 paket	1 paket	100%
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	-	30%	30%	100%

1	02	03	1.02	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan	-	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
1	02	03	1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	—	540 orang	540 orang	100%
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	40%	20%	20%	100%
1	02	05	1.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	1800 orang	1500 orang	1500 orang	10%
x	xx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	100%	100%	100%	100%
			1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
			1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%
x	xx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CRR Total	81%	78%	78%	100%
			1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	CRR Parsial	95%	90%	90%	100%
			1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian realisasi fisik kegiatan	87%	86%	86%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Kajian capaian kinerja pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	74.1	74.1	74.46	74.59	74.72	74.47	-	74.72	74.72	
2.	Prosentase capaian standar pelayanan minimal (SPM)			88.00	89.00	90.00	89.82	-	90.00	90.00	
4.	Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)			85.73	85	85.5	88.03	-	86	87	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

1. Isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

Memasuki Tahun Anggaran 2023 secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS.
- 2) Belum mantapnya sistem rujukan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah
- 3) Belum cukupnya rasio tenaga medis dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien
- 4) Meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat mendorong perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit
- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berbasis teknologi kedokteran canggih
- 6) Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan
- 7) Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat
- 8) Cepatnya perubahan regulasi yang terkait dengan pengembangan sistem informasi
- 9) Rendahnya minat tenaga kesehatan melakukan penelitian klinis sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan
- 10) Pandemi Covid berdampak merosotnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
- 11) Angka Kematian Ibu masih tinggi di Jawa Tengah diperburuk dengan kondisi COVID-19
- 12) Permasalahan aksesibilitas pelayanan dalam rangka penurunan AKI dan Stunting
- 13) Meningkatnya Kasus Stunting dan merupakan program nasional dalam bidang Kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting
- 14) Pengembangan pelayanan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dan jejaring pelayanan Kardiovaskuler intervensi dan neuro intervensi (Pelayanan Stroke Intervensi)

Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila kondisi kesehatan manusia terjaga, maka dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dimana sebagai upaya pencegahan

terhadap kejadian kesakitan upaya yang dilakukan adalah promotif dan preventif.

Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Hal lain yang sangat berpengaruh adalah Kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, dan konsumsi alkohol menjadi faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular di Jawa Tengah. Melansir berita Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan pada tahun 2019, dimana tiga PTM teratas adalah hipertensi sebanyak 68,8 persen, diabetes melitus 13,4 persen dan obesitas 5,5 persen. Peningkatan PTM tidak saja menimbulkan dampak ekonomi tapi juga mengakibatkan penurunan produktifitas karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif yang biasanya datang ke pelayanan kesehatan dalam stadium yang lanjut, dan selebihnya tidak menyadari jika dirinya menderita PTM.

Kecenderungan ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin, yaitu perenam bulan. Disamping kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan cepat saji serta kurang berolahraga.

Sementara sisi lain masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil dan perifer menjadi persoalan yang cukup berarti hal ini berakibat pada masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian di Jawa Tengah wilayah barat selatan. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih agar RSMS mampu menjadi tempat pelayanan kesehatan yang handal untuk penanganan rujukan ibu melahirkan di wilayah Jawa Tengah Barat Selatan.

Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh pula terhadap tuntutan pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu, biaya bukan satu-satunya pertimbangan pelayanan kesehatan namun yang diutamakan adalah kepuasan atas pelayanan provider dan fasilitas pelayanan yang nyaman dan memadai. Dengan fenomena tersebut maka pengembangan pelayanan kasus PTM dan ibu hamil menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi RSMS.

Asumsi-asumsi lain yang masih perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Arahan Gubernur Jawa Tengah sebagai hasil evaluasi pembangunan Tahun 2021 utamanya pada ketercapaian 10 (sepuluh) Program Unggulan dan masukan DPRD dalam konsultasi Publik antara lain berfokus pada :
 - a. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Pengurangan pengangguran terbuka
 - d. Peningkatan IPM
 - e. *Climate Change*

- f. Penanganan Stunting
 - g. Peningkatan Pendapatan Daerah
 - h. Penanganan Pandemi COVID-19
2. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 3,93 juta orang, turun 175,74 ribu orang dibanding Maret 2021 yang sebesar 4,11 juta orang, dalam rilis Indeks Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Tengah 2021 melansir BPS Jateng pada periode September 2020-September 2021, penduduk miskin di provinsi ini juga turun sebesar 185,92 ribu orang, yaitu dari 4,12 juta orang menjadi 3,93 juta orang. Selain itu, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan. Tercatat, pada September 2021 sebesar 11,25 persen, turun 0,54 persen poin dibanding Maret 2021 sebesar 11,79 persen, dan turun 0,59 persen poin dibanding September 2020 sebesar 11,84 persen.
 3. Tema RKPD 2023 (RPJMD) Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan kepada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, dengan prioritas daerah pada:
 - a. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
 - b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE);
 - c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
 - d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.
 4. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita.
 5. AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan masyarakat Jawa Tengah secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. AHH naik dari 74,37 pada tahun 2020 menjadi 74,47 pada tahun 2021, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 73 – 75 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.
 6. Tema RPJMN IV 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

7. Kaidah Pembangunan RPJMN IV 2020-2024, membangun kemadirian, menjamin keadilan dan menjaga keberlanjutan.

Mengacu pada asumsi-asumsi sesuai uraian diatas serta makna isu strategis pengembangan Jawa Tengah Tahun 2023 khususnya isu kedua yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang akan diterapkan di RSMS yang tercermin dalam renstra 2028-2023 untuk mengembangkan Pelayanan Unggulan :

- 1) Pelayanan Jantung
 - 2) Pelayanan Bedah Otak dan Saraf 3) Pelayanan Maternal Perinatal
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi RSUD Prof. Dr. Marggono Soekarjo Purwokerto.
 - a. Kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular di Jawa Tengah.
 - b. Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis (rasio tidak seimbang)
 - c. Kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap RS.
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan struktur dan SDM
 - e. Belum optimalnya kemampuan manajerial para kepala unit fungsional
 - f. Kurang optimalnya utilisasi alat medis & penunjang medis
 - g. Belum konsistennya kepastian waktu pelayanan
 - h. Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan medis
 - i. Kurang optimalnya manajemen operasional pelayanan dan pendukung pelayanan
 - j. Kurang optimalnya pelaksanaan SOP
 - k. Adanya Internal Kompetitor
 - l. Masih adanya sikap reaktif yang tidak proporsional
 - m. Tarif belum seluruhnya didasarkan pada perhitungan unit cost.
 - n. RSMS merupakan RS milik Pemprov yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki RS Pemkab
 - o. Adanya pihak ketiga yang mengontrol pelayanan/manajemen kesehatan secara tidak proporsional
 - p. Banyaknya RS swasta yang memiliki keunggulan pelayanan yang spesifik
 - q. Adanya tuntutan pelayanan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang tidak rasional
 - r. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang prima
 - s. Tingginya biaya operasional sebagai RS pendidikan
 - t. Tingginya jumlah pasien dengan jaminan asuransi kesehatan sosial (PBI dan Non PBI)
 - u. Kurang memadainya tarif asuransi kesehatan sosial
 - v. Penanganan Pandemi COVID-19

w. Pengembangan pelayanan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dan jejaring pelayanan Kardiovaskuler intervensi dan neuro intervensi (Pelayanan Stroke Intervensi)

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) **Misi** pembangunan daerah, yaitu :

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleransi dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mempercepat revormasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Adapun kinerja Rumah Sakit sesuai dengan misi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah nomor 4 yaitu “Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Disamping permasalahan seperti pada point di atas RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan. Adapun tantangan dan peluang yang ada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut:

a. Tantangan, meliputi:

1. RSMS merupakan RS milik Pemprov yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki RS Pemkab
2. Adanya pihak ketiga yang mengontrol pelayanan/manajemen kesehatan secara tidak proporsional
3. Banyaknya RS swasta yang memiliki keunggulan pelayanan yang spesifik
4. Adanya tuntutan pelayanan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang tidak rasional
5. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang prima
6. Mahalnya pembiayaan pelayanan di RSMS
7. Tingginya biaya operasional sebagai RS pendidikan
8. Tingginya jumlah pasien dengan jaminan asuransi kesehatan sosial (PBI dan Non PBI)
9. Kurang memadainya tarif asuransi kesehatan sosial
10. Tidak adanya kepastian biaya pelayanan

b. Peluang, meliputi

1. Tingginya dukungan Legislatif terhadap pengembangan pelayanan RS;
2. Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan manajemen dan organisasi RS;
3. Lingkungan Geografi & demografi yang strategis;
4. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan RS;
5. Adanya dukungan berbagai pihak (stake holder) terhadap RS
6. Belum adanya pesaing RS yang setara di Jawa Tengah kawasan Barat-Selatan;
7. Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh RS sekitar;
8. Tingginya cakupan dan luasnya jangkauan pelayanan RS;
9. Tersediannya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin;
10. RSMS sebagai RS rujukan di kawasan Barat Selatan memiliki Citra Positif;
11. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berbasis teknologi kedokteran;
12. Tingginya minat masyarakat terhadap pelayanan VIP dan VVIP
13. Adanya PERMENDAGRI 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis PPK-BLUD;
14. Adanya PERGUB sebagai dasar penetapan PPK-BLUD.
15. Pengembangan pelayanan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dan jejaring pelayanan Kardiovaskuler intervensi dan neuro intervensi (Pelayanan Stroke Intervensi)

5. Formulasi Isu-Isu Penting

Sesuai dengan hasil analisis terhadap lingkungan organisasi diatas selanjutnya dapat dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dihasilkan melalui analisis strategi sebagai berikut:

a. Strategi S – O (Offensive Strategy)

Strategi S – O adalah strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, adapun strategi-strategi tersebut meliputi:

1. Optimalkan tenaga medis yang handal dan profesional untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan unggulan
2. Optimalkan ketersediaan dana APBD maupun APBN dalam pengelolaan pelayanan kesehatan
3. Optimalkan pemanfaatan sarana & prasarana serta lokasi yang strategis sebagai pendukung proses pelayanan
4. Optimalkan alat kedokteran yang canggih sebagai pendukung pelayanan unggulan
5. Optimalkan dukungan pemerintah provinsi, legislatif dan stake holder dalam rangka PPK-BLUD sesuai PERMENDAGRI 79 tahun 2018

6. Akulturasi budaya learning organisation untuk memantapkan kepedulian terhadap pelanggan
7. Optimalkan manajemen jaminan mutu untuk mempertahankan citra positif RS sehingga minat masyarakat terhadap pelayanan RS (paviliun maupun private) semakin meningkat
8. Optimalkan pelayanan unggulan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan

b. Strategi S – T

Strategi S-T adalah strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1. Pertahankan predikat akreditasi untuk menghadapi kontrol pelayanan kesehatan yang tidak proposional dan ancaman tuntutan pelanggan terhadap pelayanan RS serta meningkatkan kepuasan pelanggan
2. Optimalkan pengembangan program pelayanan unggulan untuk menekan internal maupun eksternal kompetitor di sekitar RSMS
3. Pertahankan citra RS yang positif dengan pemantapan learning organisation
4. Optimalkan pelaksanaan SOP untuk kepastian biaya pasien

c. Strategi W – O (Turn Around Strategy)

Strategi W – O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1. Tingkatkan komitmen SDM dengan PPK-BLUD sehingga RS dapat menerapkan sistem pentarifan dan remunerasi yang lebih adil dan proporsional
2. Dibangunnya sistem remunerasi dengan mengoptimalkan SIMRS untuk menerapkan budaya reward & punishment
3. Atasi kualitas SDM yang belum memadai dengan diklat atas dukungan dana APBD
4. Atasi budaya reaktif yang tidak proporsional dan ketidakkonsistenan menjalankan SOP dengan pemantapan budaya learning organisation
5. Atasi kurang optimalnya manajemen pemeliharaan dan utilisasi alat dengan modal kemauan untuk melakukan perubahan.

d. Strategi W – T (Defensif Strategy)

Strategi W – T adalah strategi untuk meminimalkan kelemahan dalam menghadapi ancaman. Adapun strategi-strategi tersebut meliputi:

1. Tingkatkan komitmen & kualitas SDM dengan tingginya ancaman tuntutan pelayanan kesehatan oleh pelanggan
2. Tingkatkan efisiensi pelayanan untuk pasien dengan jaminan asuransi kesehatan maskin
3. Atasi peraturan yang tidak fleksibel dengan penerapan PPK-BLUD
4. Perbaiki sistem pentarifan untuk pasien maskin

Berdasarkan tabel analisis strategi di atas maka dapat disimpulkan, yang menjadi isu-isu strategis adalah:

1. Pengembangan kualitas & kuantitas SDM untuk meningkatkan kapasitas
2. Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran
3. Peningkatan manajemen sarana & prasarana RS
4. Pengembangan manajemen mutu RS
5. Pengembangan promosi & kerjasama dengan pihak ketiga
6. Pengembangan sistem perencanaan anggaran PPK-BLUD
7. Pengembangan budaya organisasi pembelajar

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berikut ini hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Mendasarkan RPJPD Tahun 2005 - 2025 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM, diarahkan pada percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing, fokus pada :

Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan.

Adapun review Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 2.4
 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	RSMS	Prosentase capaian CRR Total	81%	676.591.036.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	RSMS	Prosentase capaian CRR Total	81%	673.186.939.000	
	Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD	RSMS	Persentase CRR Parsial	95	540.000.000.000	Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD	RSMS	Persentase CRR Parsial	95	559.000.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	RSMS	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	100%	119.786.997.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	RSMS	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	100%	114.186.939.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	RSMS	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi keuangan PD	12 Lap	119.786.997.000	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	RSMS	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi keuangan PD	12 Lap	114.186.939.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSMS	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan	12 Bulan	119.786.997.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSMS	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan	12 Bulan	114.186.939.000	
	URUSAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN										

1	Program Pemenuhan UKP dan UKM	RSMS	Persentase Pemenuhan UKP dan UKM	-	-	Program Pemenuhan UKP dan UKM	RSMS	Persentase Pemenuhan UKP dan UKM	100%	250.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk	RSMS	Persentase Penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk	-	-	Kegiatan Penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP	RSMS	Persentase Penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk	100%		

19

	UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi		UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi			rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi		UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi			
	Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	RSMS	Jumlah Paket pemenuhanAlat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan	RSMS	Jumlah Paket pemenuhanAlat Kesehatan/Al at Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSMS	Prosentase SDM Kesehatan yang terlatih	40%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSMS	Prosentase SDM Kesehatan yang terlatih	40%		
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	RSMS	Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan	5 Keg		Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	RSMS	Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan	5 Keg		
	Peningkatan dan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSMS	Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang mengikuti diklat	720 Orang		Peningkatan dan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSMS	Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang mengikuti diklat	720 Orang		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSMS	Capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat propinsi	40%	250.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RSMS	Capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat propinsi	40%	250.000.000	
	Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat darah provinsi	RSMS	Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan	3 Keg	250.000.000	Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat darah provinsi	RSMS	Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan	3 Keg	250.000.000	

	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemnberdayaan, penggalanagn, kemitraan, peran serta masyarakat dan dari lintas sektor tingkat daerah Provinsi	RSSM	Junlah Peserta Kegiatan Preventif, Promotif pendukung Hospital Without Wall (HWW)	1500 Orang	250.000.000	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemnberdayaan, penggalanagn, kemitraan, peran serta masyarakat dan dari lintas sektor tingkat daerah Provinsi	RSSM	Junlah Peserta Kegiatan Preventif, Promotif pendukung Hospital Without Wall (HWW)	1500 Orang	250.000.000	
	JUMLAH				676.592.036.000	JUMLAH				673.436.939.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Untuk tahun 2023 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto mendapatkan usulan sektoral terkait melalui kegiatan Forum OPD yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, LSM, assosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan secara langsung.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi; Tujuan dan sasaran Renja

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

No	Kebijakan		
	RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4
1.	Pemanfaatan media dan institusi sebagai sarana promosi.	Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing .	1. SDM berkualitas dan berdaya saing. 2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 3. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
2	Penerapan Sistem Informasi Manajemen terintegrasi secara total menuju paperless		
3	Pemanfaatan teknologi kedokteran canggih untuk ketepatan diagnosa dan terapi		
4	Penyediaan Sarpras RS yang unggul, aman dan Efisien		
5	Pengikatan kerjasama dengan institusi pendidikan yang menjamin mutu RS Pendidikan		
6	Rumah Sakit Tanpa Dinding Pra Hospital, Intra Hospital, Pasca Hospital		

Mengacu tema RPJMN IV 2020-2024 “ **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong**” dengan Visi-Misi dan arahan Presiden yang terdiri dari Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “**Nawa Cita**”, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2023, antara lain meliputi:

- a. Penurunan konflik Sara 15%
- b. Indek Reformasi Birokrasi sebesar 80 persen
- c. Angka Kemiskinan 9,51 – 9,29 %
- d. Indek Gini 0,34
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,63-4,80%

- f. Pertumbuhan Ekonomi 5 – 5,60%
- g. Inflasi 3.0 ±1%
- h. Indeks Williamson 0,56
- i. Nilai Tukar Petani 104,05
- j. Indeks Pembangunan Manusia 72,75
- k. Indeks Pembangunan Gender 92,21
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67.57

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Arah pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**. Prioritas dan fokus pembangunan daerah juga harus menjadi dasar dalam menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2023 adalah Peningkatan kualitas dan akses Pendidikan, peningkatan akses layanan dasar, pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak, Pelayanan Maternal untuk menurunkan AKI dan Pencegahan dan penanganan Stunting. Pembangunan kesehatan melalui pemerataan nakes, fasyankes, farmasi, alkes dan digitalisasi.

Isu Strategis Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 :

- 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- 2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
- 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
- 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, sertapemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah;

Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto disinkronkan dengan kebijakan daerah dan

urusan yang menjadi kewenangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yaitu:

1. Kualitas hidup dan Daya Saing SDM yaitu Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan promosi kesehatan yang efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan melalui penguatan kelembagaan dan jejaring promosi misalnya Tim Ponek, Poned dan Tim Promosi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas terkait lainnya, informasi-informasi pengembangan pelayanan dan kegiatan pelayanan secara massif melalui media social dan elektronik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
2. Peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (alat kesehatan dan penunjang) sesuai standar RS Kelas A
3. Pengembangan SIM RS Rujukan *Online*; peningkatan kualitas dan pemerataan cakupan tenaga kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi menuju paperless.
4. Peningkatan capaian wilayah *melalui kegiatan pengembangan informasi pelayanan publik berbasis IT*.
5. Penetapan Indikator Kinerja dengan Penurunan angka kesakitan dan kematian melalui Standar Pelayanan Minimum (SPM), Peningkatan kualitas pelayanan melalui Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja **RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto** berdasarkan rancangan awal Renstra **RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto** tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator AHH (Angka Harapan Hidup) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu dengan program RS tanpa dinding, dengan sasaran yang akan diwujudkan adalah:
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian, dengan indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. Meningkatkan Tata Kelola RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dengan sasaran yang akan diwujudkan :

“Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)”

Perumusan tujuan dan sasaran Renja PD sesuai dengan tupoksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD, dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Tahun 2023

No	Tujuan	Saran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74.72
		Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	90
2.	Meningkatkan Tata Kelola RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto		Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	85,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto	Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	85,5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Arah Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 yang mengangkat tema “**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**” yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2019-2024 yaitu “Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”.
- Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada “Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing”.
- Pencapaian SPM, Nilai SKM
- Peningkatan Pelayanan Rujukan Bidang Kesehatan.
- Pendukung Pelayanan JKN
- Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan adalah 4 (empat) program dengan 5 (Lima) kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu
 - a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Kebutuhan dana/pagu untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp **673.436.939.000,-** yang bersumber dari APBD dan BLUD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah
RSUD Prof Dr Margono Soekarjo

Program/ Kegiatan dan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Perioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah (IKU Pemda)		Tujuan dan Sasaran OPD		Target Indikator Kinerja Tahun 2023						Pagu Indi-katif	Prakiraan Maju Tahun 2024		Lok asi	Penang - gungja- wab /Unit Kerja
			Uraian	Target	Uraian	Target	Hasil		Capaian Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Rp. (000)	Target Indi- kator		
							Tolok Ukur (Indika- tor)	Target	Tolok Ukur (Indika- tor)	Target	Tolok Ukur (Indika- tor)	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Percepatan pemulihan dan peningkata n kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing	Memperkuat infrastruktur untuk mendu- kung pengembang- an ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkat- kan Tata Kelola Organisasi		Nilai Kepuasan	85,5	CRR Total	83%					653.407.852	83%	653.407.852		
			Meningkat- nya kualitas pelaynan		Nilai Kepuasan	85,5											
Keg. Peningkatan Pelaya- nan BLUD									Persentase CRR Parsial	95%			540.000.000	95%	540.000.000		

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelaynan											Capaian realisasi fisik kegiatan	87	540.000.000	87	540.000.000		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi							Persentaase ketercapaian pelayanan umum, kepegawai-an dan keuangan PD	100%					113.407.852	100%	113.407.852		
Keg. Administrasi Keuangan PD									Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan PD	12 lap			113.407.852	12 lap	113.407.852		
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	113.407.852	12	113.407.852		
			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	74,72							-	74,72	-		
			Menurunnya angka kesakitan dan kematian		Persentase capaian SPM (RSUD Prof Dr Margono Soekarjo)	90							-	90	-		
Program Pemenuhan UKP dan UKM							Persentase pemenuhan upaya UKP dan UKM	100%					-	100%	-		

Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%			-	100%	-		
Sub Keg. Pengadaan alat kesehatan /alat penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan											Jumlah paket pemenuhan Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan						
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan							Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	40%					-	40%	-		

Keg. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan	5 Kegiatan			-	5 Kegiatan	-		
Sub Keg. Peningkatan Kompetensi dan kualitas SDM kesehatan											Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	720 orang	-	720 orang	-		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							Pesentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	20%					250.000	40%	250.000		
Keg. Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi									Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan	3 kegiatan			250.000	3 kegiatan	250.000		
Sub Keg. Peningkatan											Jumlah peserta	1800	250.000	1800	250.000		

n upaya advokasi kesehatan, pemberday aan, penggalang an, kemitraan, peran serta masyarakat lintas sektor tingkat daerah provinsi											kegiatan preventif, promotif pendukung hospital without walls (HWW)						
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo “Prima Dalam Pelayanan Sub Spesialistik dan Pendidikan Profesi”.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini mengacu pada dokumen Rencana Strategik (Renstra) RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Tahun 2018 - 2023 yang telah **direvisi** untuk pelaksanaan 2021-2023 sesuai Permendagri 90/2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kemendagri No. 050.3708/2020 tentang Penyesuaian Nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub sub kegiatan.

Beberapa 20 yang belum selesai pada tahun 2021 adalah Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD sesuai dengan Kemendagri No. 050.3708/2020 yang semula menjadi urusan Kesehatan diubah menjadi Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat mendukung Visi Jawa Tengah yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.